

PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (SAKD) terhadap KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (KLK)

Lambok Vera Riama Pangaribuan¹⁾, Firmansyah²⁾, Muhammad Danial³⁾
Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya
e-Mail : p.vera98@yahoo.com

Abstract

This study aimed to examine the effect of the application of The Influence of Human Resources Competition and Region Financial Accounting System towards the Quality of Financial Statement in Palembang City. The population in this study is the Regional Working Units (on education) District.Fifty Cities. The sample of this study are 87 respondents that obtained from the head of the sub-section of finance, treasurer, and staf, but only 60 questionnaires can be processed. The data was collected by distributing questionnaires to the respondents directly concerned. Analysis technic of the data used is multiple linearregression with SPSS 20. The results showed: that the competency of HR positive significant effect on the quality of the financial reporting area. While the application of positive SAKD no significant effect on the quality of the financial reporting area.

Keywords: HR Competency, SAKD, Quality of Financial Statements area

1. PENDAHULUAN

Tahun 1999 Pemerintah Indonesia telah menggulirkan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dalam rangka otonomi daerah ini dikeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan, antara lain Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan diperbarui dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Regulasi yang dikeluarkan tersebut mengharuskan Pemerintah Daerah untuk mengelola keuangannya sendiri dengan baik sehingga dapat lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap masyarakat karena memang sebagian besar keuangan Negara Indonesia berasal dari Pajak yang dibayar masyarakat kepada negara.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, pemerintah diwajibkan menerapkan basis akuntansi akrual secara penuh atas pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja negara paling lambat tahun anggaran 2008.

Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa akuntansi basis akrual dianggap lebih baik daripada akuntansi berbasis kas karena dianggap laporan keuangan yang disajikan lebih dapat dipercaya, lebih akurat, lebih komprehensif, dan lebih relevan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan dari segi ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Jadi, pencatatan (*recording*) dilakukan sesuai dengan saat terjadinya

arus sumber daya sehingga informasi dapat disajikan secara tepat dan komprehensif.

Dalam konteks akuntansi pemerintah daerah, Ritonga (2010) membaginya menjadi empat tahap. Tahap pertama sampai dengan tahap keempat yang masih berlaku sampai sekarang yaitu periode Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual antara Tahun 2010 sampai sekarang. Reformasi yang terjadi adalah dimulainya penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual dengan dikeluarkannya PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Selain berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan dalam penyusunan laporan keuangan, pemerintah daerah Kabupaten/Kota juga membutuhkan sistem agar proses penyusunannya lebih terarah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah sistem yang menyediakan informasi keuangan yang lengkap, cermat, akurat sehingga dapat menyajikan laporan keuangan yang handal, dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan oleh berbagai pihak eksternal. Seperti yang tertuang pada PP No. 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah agar dapat melanjutkan reformasi dibidang pengelolaan keuangan daerah. Selain itu menurut Permendagri 64 Tahun 2013 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi

sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan daerah. Sehingga pemerintah daerah dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dengan mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan.

Kompetensi Sumber Daya Manusia juga berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, karena kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kompetensinya harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*output*) dan hasil-hasil (*outcome*) yaitu salah satunya menghasilkan kualitas laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Setelah diberlakukannya PP No. 71 Tahun 2010, penyusunan laporan keuangan SKPD harus menerapkan basis akrual. Laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi empat kriteria yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Kota Palembang dari tahun 2011-2015 mendapatkan opini dari BPK WTP (wajar tanpa pengecualian) dari IHPS tahun 2016, karena laporan keuangannya disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (infopublik, 23 Juni 2014).

Rumusan Masalah

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia dan sistem akuntansi keuangan daerah mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh SKPD dinas dan badan kota Palembang?
2. Apakah kompetensi sumber daya manusia mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh SKPD dinas dan badan kota Palembang?
3. Apakah kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh sistem akuntansi keuangan daerah?

2. KAJIAN LITERATUR

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Menurut Ermaya Sumber Daya Manusia, yaitu

“Sumber daya manusia adalah faktor utama dan pertama dalam setiap proses pembangunan. Sumber daya manusia di dalam pembangunan memiliki peran ganda yaitu menjadi subjek dan objek dari aktivitas pembangunan yang dijalankan”.

Secara garis besar, pengertian Sumber Daya Manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Pengertian sistem akuntansi keuangan daerah itu sendiri terdapat dalam Keputusan Mendagri No. 29 Tahun 2002, tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang berbunyi: “Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah suatu sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atas kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi”. (Pasal 70: ayat 1).

Sedangkan didalam Kepmendagri No. 13 Tahun 2006, mengemukakan: “Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer”. (Pasal 23: ayat 1) Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh yang ditinjau untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak intern dan pihak ekstern pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi.

Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 merupakan “laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelapor”.

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintah, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi epektifitas, efesiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Komponen laporan keuangan berdasarkan PP 71 tahun 2010:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) ada empat karakteristik yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki dan beracuan dengan PP No. 71 Tahun 2010 yang mengharuskan laporan keuangan berbasis akrual adalah sebagai berikut:

1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Informasi dikatakan relevan jika memiliki kriteria dibawah ini:

1. Memiliki manfaat umpan balik
2. Memiliki manfaat prediktif
3. Tepat waktu.
4. Lengkap.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik sebagai berikut:

1. Penyajian jujur.
2. Dapat diverifikasi
3. Netralitas.

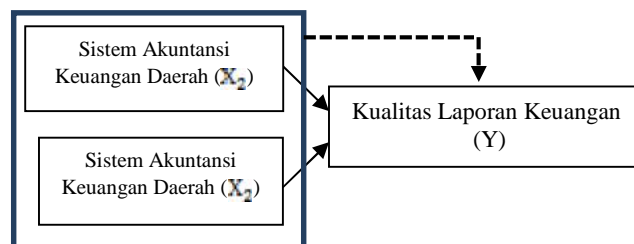
3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke-tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas

kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.



Gambar 1

Kerangka Pemikiran

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, (2017) data kuantitatif adalah data berupa angka-angka misalnya jumlah penduduk Indonesia tahun 2000 sebesar 200 juta. Angka 200 juta merupakan data kuantitatif.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh kelompok orang yang ingin diteliti. Populasi penelitian ini yaitu seluruh karyawan staf bagian keuangan yang terdiri dari 3 orang di 29 OPD Dinas dan Badan Kota Palembang. Jumlah populasi dalam penelitian sebanyak 87 responden, dan menggunakan sampel jenuh. Dari 87 tersebut yang dapat diolah sebanyak 60 kuesioner.

Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuisisioner. Teknik ini memberikan pertanggungjawaban kepada responden untuk membaca dan menjawab pertanyaan. Data penelitian ini dikumpulkan dengan mendatangi langsung dan meminta responden mengisi kuisisioner yang diberikan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Demografi Responden

1. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Berdasarkan Penelitian yang dilakukan di seluruh OPD dinas dan badan kota Palembang didapat jumlah responden berdasarkan jenis kelamin, perempuan lebih banyak yaitu 31 orang dan laki-laki 29 orang di bagian keuangan.

2. Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan di seluruh OPD dinas dan badan kota Palembang didapat jumlah responden berdasarkan pendidikan terakhir, didapat pendidikan responden di dominasi S1 di pendidikan D3 dan lain-lain masing-masing 1 orang.

3. Responden Berdasarkan Masa Jabatan

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan di seluruh OPD dinas dan badan kota Palembang didapat jumlah responden berdasarkan masa jabatan, rata-rata masa jabatan responden di kisaran 0-5 tahun sebanyak 31 orang, 6-10 tahun 26 orang, dan 11-15 tahun sebanyak 3 orang.

Hasil Pengujian Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Ghozali(2013) *Screening* terhadap normalitas data merupakan langkah awal yang harus dilakukan untuk setiap analisis multivariate, khususnya jika tujuannya adalah inferensi. Uji normalitas residual dilakukan dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnovtest* dengan tarafsignifikan 5%. Dasar pengambilan keputusan nilai Sig < 0,05 maka dikatakan berdistribusi normal. Jika nilai Sig < 0,05 maka dikatakan berdistribusi tidak normal. Nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* yang didapat sebesar 0,941 dimana nilai tersebut melebihi batas minimum nilai normalitas sebesar >0.05 yang mana bermakna bahwa data sudah terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah keadaan dimana pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna diantara variabel bebas (korelasinya 1 atau mendekati 1). Beberapa metode uji multikolinearitas yaitu dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Inflation Factor (VIF)* pada model regresi atau dengan membandingkan nilai koefisien determinasi individual (r^2) dengan nilai determinasi secara serentak. Didapat bahwa nilai *Tolerance* kedua variabel lebih dari 0,10 dan nilai *VIF* kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas pada model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2013), uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas, penelitian ini menggunakan uji *Spearman's rho*. Pengujian ini menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi. Didapat bahwa nilai korelasi kedua variabel independen dengan *unstandardized* residual memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Teknik Analisis Data Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta				
(Constant)	.703	.324		2.172	.034		
Kompetensi SDM	.241	.091	.267	2.652	.010	.554	1.805
SAKD	.601	.097	.622	6.184	.000	.554	1.805

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan table diatas, diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$Y = 0,703 + 0,241X_1 + 0,601X_2$$

Persamaan regresi diatas menunjukkan koefisien regresi dari 1 dan 2 bernilai positif. Hal ini menunjukkan variable - variabel independen apabila ditingkatkan maka akan menimbulkan peningkatan pada variabel dependennya.

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.825 ^a	.680	.669	.24620

a. Predictors: (Constant), SKAD, Kompetensi SDM

b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

- Nilai konstanta sebesar 0,703 artinya jika variabel kompetensi SDM dan SKAD nilai 0, maka nilai kualitas laporan keuangan akan sebesar 0,703.
- Koefisien regresi untuk variabel kompetensi SDM sebesar 0,241. Artinya bahwa setiap peningkatan kompetensi SDM sebesar 1, maka tingkat kualitas laporan keuangan akan meningkat sebesar 0,241.
- Koefisien regresi untuk variabel SKAD bertanda positif sebesar 0,601. Artinya bahwa setiap peningkatan SKAD sebesar 1, maka tingkat kualitas laporan keuangan akan meningkat sebesar 0,601.

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan output table diatas model *summary* diatas menjelaskan tentang ringkasan model, yang terdiri dari hasil nilai korelasi berganda (R), koefisien determinasi (*R Square*), koefisien determinasi yang disesuaikan (*Adjusted R Square*), dan ukuran kesalahan prediksi (*Std Error of the estimate*).

R dalam regresi linear berganda menunjukkan nilai korelasi berganda, yaitu korelasi antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R berkisar antara 0 sampai 1, jika mendekati 1 maka hubungan semakin erat, tetapi jika mendekati 0 maka hubungan semakin lemah. Angka R yang didapat 0,825 artinya korelasi antara variabel

kompetensi sumber daya manusia dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Palembang sebesar 0,825. Hal ini berarti terjadi hubungan yang sangat erat karena nilai mendekati 1.

R Square, adalah *R square* yang telah disesuaikan, nilai sebesar 0,680, ini menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, artinya persentase sumbangan pengaruh variabel kompetensi sumber daya manusia dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Palembang sebesar 68%, sedangkan sisanya ($100\% - 68\% = 32\%$) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan di model ini.

2. Uji Simultan (Uji F)

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	7.347	2	3.674	60.604	.000 ^a
Residual	3.455	57	.061		
Total	10.802	59			

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

b. Predictors: (Constant), SAKD, Kompetensi SDM

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat nilai f-hitung adalah sebesar 60,604 dan signifikansi sebesar 0,000. Hal tersebut mengindikasikan bahwa f-hitung sebesar 60,604 lebih besar dari F-tabel 3,159, sehingga dapat dinyatakan bahwa secara simultan variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_1 dan X_2) secara simultan mempengaruhi variabel dependen Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y).

Tingkat signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05 atau 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_1 dan X_2) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Y) sebesar 0%. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka hipotesis peneliti bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah (H3) dapat diterima.

3. Uji Parsial (Uji T)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.703	.324		2.172	.034
Kompetensi SDM	.241	.091	.267	2.652	.010
SAKD	.601	.097	.622	6.184	.000

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil analisis tabel diatas bahwa Nilai T-Tabeldicari dengan derajat kebebasan $df = n -$

$k - 1$ atau $35 - 3 - 1 = 31$. Hasil diperoleh untuk T-tabel sebesar 2,002. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ atau 5% maka hipotesis dapat diterima. Pada variabel kompetensi SDM (X_1) nilai t-hitung sebesar 2,652 lebih besar dari nilai T-tabel 2,002, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel independen kompetensi SDM (X_1) memiliki pengaruh terhadap variabel dependen kualitas laporan keuangan (Y). Berdasarkan hasil tersebut, maka hipotesis peneliti bahwa kompetensi

SDM mempengaruhi kualitas laporan keuangan (H1) dapat diterima dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Untuk variabel SAKD (X_2) nilai t-hitung sebesar 6,184 lebih besar dari nilai T-tabel 2,002, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel SAKD (X_2) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Y). Dengan kata lain, hipotesis peneliti bahwa SAKD (H2) diterima.

Pembahasan

Pengaruh Kompetensi SDM dan SAKD terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasiljawaban responden dan pengujian hipotesis, nilai f-hitung variabel Kompetensi SDM dan SAKD adalah sebesar 60,604 jika dibandingkan dengan nilai F-tabel adalah sebesar 3,159. Maka f-hitung yang diperoleh jauh lebih besar dari nilai F-tabel maka dapat disimpulkan bahwa variabel kompetensi SDM dan SAKD memiliki hubungan atau berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kota Palembang.

Kompetensi SDM dan SAKD adalah salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Menurut (Ropiyantie, 2012) kompetensi sumber daya manusia dan sistem akuntansi keuangan daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Abdul Halim (2004) yang menyatakan untuk dapat menyediakan informasi secara tepat dan akurat dibutuhkan suatu sistem yang dapat digunakan dalam rangka penyediaan informasi laporan keuangan pada OPD dinas dan badan kota Palembang.

Jika kompetensi SDM dan SAKD dilaksanakan dengan baik, maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan meningkat, sehingga laporan keuangan yang baik sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010 tentang laporan keuangan. Dengan demikian kompetensi SDM dan SAKD ditunjukkan agar penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Sehingga akan menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Pengaruh Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, nilai t-hitung untuk variabel Kompetensi SDM adalah sebesar 2,652 jika dibandingkan dengan nilai T-tabel adalah 2.002. Maka t-hitung yang diperoleh lebih besar dari nilai T-tabel sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kompetensi SDM memiliki hubungan atau berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kota Palembang.

Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis kekuatan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen atau analisis untuk mengetahui seberapa besar variabel bebas menjelaskan variabel terikat, dapat diketahui bahwa koefisien determinasi R^2 sebesar 0,680. Nilai ini berarti bahwa sebesar 68% variabel mengenai kualitas laporan keuangan SKPD Kota Palembang dipengaruhi oleh kompetensi SDM, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.

Jika kompetensi sumber daya manusia dilaksanakan dengan baik, maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan meningkat, sehingga laporan keuangan yang baik sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010 tentang laporan keuangan. Dengan demikian kompetensi sumber daya manusia ditunjukkan agar penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Dilihat dari distribusi frekuensi, bahwa kompetensi SDM memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah hal ini dapat dibuktikan dari jawaban responden terhadap kuisioner yang disebarkan. Secara garis besar kompetensi SDM

Kualitas Laporan Keuangan

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai t-hitung variabel SAKD adalah sebesar 6,184 jika dibandingkan dengan nilai T-tabel adalah sebesar 2.002. Nilai t-hitung yang diperoleh lebih besar dari nilai T-tabel, maka dapat disimpulkan bahwa variabel SAKD memiliki hubungan atau berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kota Palembang.

Berdasarkan hasil analisis kekuatan hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas atau analisis untuk mengetahui seberapa besar variabel bebas menjelaskan variabel terikat ditemukan koefisien determinasi R^2 sebesar 0,680. Nilai ini berarti bahwa sebesar 68% variabel mengenai kualitas laporan keuangan SKPD Kota Palembang dipengaruhi oleh SAKD, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak sertakan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini didukung oleh teori yang menyatakan bahwa Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdul Halim

(2004) yang menyatakan untuk dapat menyediakan informasi secara tepat dan akurat dibutuhkan suatu sistem yang dapat digunakan dalam rangka penyediaan informasi laporan keuangan pada OPD dinas dan badan kota Palembang. Sedangkan Ropiyantie (2012) dan Sihombing (2011) yang menemukan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Apabila OPD dinas dan badan menerapkan SAKD pada pemerintah kota Palembang dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku maka akan menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

5. KESIMPULAN

1. Kompetensi sumber daya manusia dan sistem akuntansi keuangan daerah secara bersama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan kota Palembang, artinya dengan sumber daya manusia yang berkompentensi dan menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah yang berkelanjutan akan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.
2. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan kota Palembang, artinya dengan sumber daya manusia yang berkompentensi akan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.
3. Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara terhadap kualitas laporan keuangan kota Palembang.

Saran

1. Kompetensi sumber daya manusia mendukung kualitas laporan keuangan, agar dapat terus berkelanjutan maka pemerintah harus melakukan pelatihan (*workshop*) mengenai tata cara pembuatan laporan keuangan yang berkualitas.
2. Sistem akuntansi juga berpengaruh positif dengan laporan keuangan yang berkualitas, karena untuk membuat laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan sistem akuntansi agar proses akuntansinya berjalan sesuai dengan aturan, dalam hal ini sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.
3. Dalam penelitian ini masih terdapat kekurangan dan perlu adanya perbaikan, terutama terkait dengan jumlah populasi, sampel, dan variabel yang digunakan. Oleh karena itu, untuk peneliti selanjutnya agar menambah jumlah populasi, sampel dan variabel lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah seperti standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian internal pada pemerintah daerah.

REFERENSI

- Botutihe, Tutun Hermawanto. 2013. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Kota Gorontalo. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Universitas Negeri Gorontalo*. Gorontalo.
- BPPK Kemenkeu. *Menyongsong Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua* (<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/berita-makassar/19410-menyongsong-penerapan-akuntansi-pemerintahan-berbasis-akrua>, diakses, 29 Juni 2017).
- Darmayani, Made Ayu; Nyoman Trisna Herawati, dan Anantawikrama Tungga Atmaja. 2014. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), Dan Pengendalian Intern Terhadap Nilai Laporan Keuangan Pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Buleleng. *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No: 1 Tahun 2014*
- Emilda Ihsanti. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. (Studi Empiris pada SKPD Kab. Lima Puluh Kota) Padang: Universitas Negeri Padang.
- Erlina, Omar Sakti Rambe, Rasdianto. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Jakarta : Salemba Empat.
- Ghozali. 2013. *Aplikasi Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2014. *Akuntansi Sektor Publik; Akuntansi Keuangan Daerah* Jakarta : Salemba Empat
- Husna, Fadhilla. 2013. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengawasan Keuangan, dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Nilai Pelaporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Kota Padang Panjang. Inspektorat Kabupaten Kulo Progo. *PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. (<http://inspektorat.kulonprogokab.go.id/article-1057-pp-71-tahun-2010-tentang-standar-akuntansi-pemerintah.html>, diakses 14 Februari 2017).
- Febry Perdana Kusuma, I Nyoman Mahaendra Yasa, I Ketut Djayastra. 2016. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana., *E-Journal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*. Volume.05.No. 12 tahun 2016
- Menteri Keuangan. 2011. *Peraturan 05 Nomor 238 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. 2013. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah*.
- Peraturan Pemerintah. 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Laporan Keuangan*.
- Permadi. 2013. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat). *Skripsi*. Universitas Widyatama Bandung.
- Priyatno, Duwi. 2012. *Belajar Analisis Data dengan SPSS 20*. Yogyakarta: Andi.
- Purwanto dan Sulistyastuti. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabet.
- Wati, Kadek Desiana, Nyoman Trisna Herawati, Ni Kadek Sinarwati. 2014. Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Undiksha*, Vol 2. No. 1 2014
<http://tulisanterkini.com/artikel/artikel-ilmiah/9188-karakteristik-ideal-sumber-daya-manusia-berkualitas.html>, diakses, 6 Februari 2017).
<http://yunatun09.blogspot.co.id/2011/06/pengertian-dan-karakteristik-akuntansi.html>, diakses, 14 Februari 2017).
- <http://fulcra.asia/empat-kualitas-utama-sebuah-laporan-keuangan/>, diakses, 14 Februari 2017).
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_manusia, diakses, 6 Februari 2017
- <http://ilmuakuntansi.web.id/pengertian-sistem-akuntansi/>, diakses 4 Juli 2017).
- <https://monogatarinoimi.wordpress.com/2013/04/07/pengertian-dan-karakteristik-akuntansi-pemerintahan/>, diakses, 14 Februari 2017).
- <http://www.satujam.com/sumber-daya-manusia/>, diakses, 22 Februari 2017).
- <http://sistemakuntansi1000.blogspot.co.id/2009/08/pengertian-sistem.html>, diakses, 12 Februari 2017).
- <http://mitoyono.blogspot.co.id/2011/01/sistemakuntansi-pemerintahdaerah.html>, diakses, 18 Januari 2017).
- <http://noviamelia1993.blogspot.co.id/2015/06/stisip-stia-budhi-rangkasbitungsekolah.html>, diakses 15 Februari 2017).